

NASKAH PUBLIKASI

MEKANISME AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA CATURTUNGGAL TAHUN 2017

Oleh:

Nurul Ika Bertiyanti
20150520027

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Isnaini Muallidin, S.IP., MPA
NIK: 19710225201204 163 130

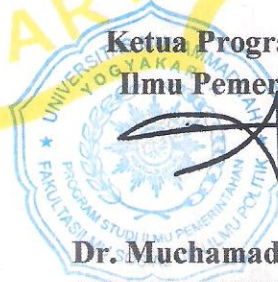
Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**



Dr. Fitri Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603163038

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403163025

**MEKANISME AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA CATURTUNGGAL
TAHUN 2017**

Nurul Ika Bertiyanti¹, Isnaini Muallidin²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email:¹Nurulikaberti@gmail.com,

Abstrak

Akuntabilitas di Desa Caturtunggal merupakan bentuk hasil penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik dan transparansi yang diberikan pemerintah. Akuntabilitas sosial ini lebih menekankan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, mekanisme akuntabilitas sosial di Desa Caturtunggal. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Desa Caturtunggal yaitu komunikasi dalam bentuk arahan kepada masyarakat. Dalam pemberian pelayanan telah sesuai konsep akuntabilitas pelayanan. Desa Caturtunggal telah menerapkan sistem transparansi dengan membentuk forum bersama warga sebagai wadah untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban. Namun masih terdapat beberapa hal yang belum berhasil.

Kata Kunci : Akuntabilitas publik, Pembangunan, Kearifan lokal

PENDAHULUAN

Mekanisme akuntabilitas dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini untuk memenuhi terwujudnya sektor publik yang akuntabel, mekanisme akuntabilitas harus memiliki dimensi akuntabilitas yaitu, akuntabilitas hukum dimana akuntabilitas hukum terkait dengan

kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang ditetapkan. Akuntabilitas proses dimana akuntabilitas ini terkait dengan apakah proses yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah terlaksana cukup baik atau belum dalam pemberian pelayanan, pengawasan hingga pemeriksaan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi dan

nepotisme(Djalil, 2014). Sebagaimana dipaparkandalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari segi untuk mengimplementasikan terdapat pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan pasal 20 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di antaranya yaitu asas akuntabilitas menyatakan bahwa setiap tindakan dan kinerja pemerintah, wajib untuk di pertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berada di atasnya. Peranan pemerintah dalam keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan atau program sangatlah penting. Pemerintah memegang peranan dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan.(Utami, 2014). Akuntabilitas juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab mengenai apa yang telah, sedang dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik (Mahmudi,2009:9). Kenyataannya bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan pemerintah yang

akuntabel harus memiliki prinsip – prinsip. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publikMampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah (mahmudi, 2014). .Berdasarkan prinsip tersebut ditemukan bahwa, di Desa Caturtunggal yang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sleman Provinsi DIY yang memiliki penduduk yang telah mencapai 43.840 jiwa (informasi kependudukan Desa Caturtunggal) dengan kondisi dan karakteristik yang berbeda, mengakibatkan timbulnya permasalahan. Salah satunya adalah

masalah mekanisme akuntabilitas, adanya keluhan dari masyarakat terhadap kurangnya kualitas mekanisme akuntabilitas merupakan salah satu indikator yang menunjukkan belum memadainya aparatur pemerintahan yang akuntabel.

Sehubungan dengan masalah itu jika dilihat dari posisinya suatu desa memiliki posisi yang penting bagi masyarakat. Dimana desa sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. pemerintah Desa Caturtunggal selaku pejabat desa dituntut untuk akuntabel baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban, dan diketahui bahwa desa sendiri tidak mempunyai mekanisme yang jelas untuk sebuah proses pendekatan terhadap masyarakat hanya dalam bentuk pembuatan laporan, website sementara *impact* terhadap masyarakatnya tidak ada sama sekali masyarakatnya cuek dan tidak peduli dan sementara masyarakat lebih patuh terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang ada dibanding

dengan peraturan yang sudah pemerintah tetapkan. Kurangnya kualitas dan pemahaman sumber daya masyarakat dalam pembuatan laporan yang dimiliki Desa Caturtunggal sehingga menjadi faktor penyebab kurangnya akuntabel Pemerintah Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berobjek pada proses mekanisme akuntabilitas sosial dalam pembangunan berbasis kearifan lokal. menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dalam hal ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai mekanisme akuntabilitas publik yang telah dilakukan Pemerintah Desa Caturtunggal Kabupaten Depok pada tahun 2017. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol; (2) penggalan data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subyek; dan (3) untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-

kategori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah (Salim, 2006). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu melalui dokumentasi dan wawancara. Adapun narasumber wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala Desa Caturtunggal

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kepemimpinan

kepala desa Caturtunggal menempatkan musyawarah dengan bentuk pertemuan antara pemerintah desa dengan berbagai tokoh masyarakat sebagai bentuk model pemecahan masalah. Dari adanya pertemuan yang diselenggarakan tersebut akan terjalin komunikasi yang terjadi terus menerus. Kegiatan yang dilakukan tersebut juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Caturtunggal. bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Desa Caturtunggal yaitu komunikasi dalam bentuk arahan

kepada masyarakat. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa baik dalam pembangunan ataupun pelaksanaan program lainnya.

b. Pelayanan Sosial

Dalam akuntabilitas administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya, Pemerintah Desa Caturtunggal melakukan kewajiban dalam menjalankan tugas diinstruksikan oleh kepala desa dan tugas umum yang terdapat dalam kebijakan daerah dalam rangka penyelesaian kerja secara otoritas atas pelayanan dari sumber daya yang ada sebagai perangkat desa. Telah dijelaskan pula dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menuntut harus efektif dan efisien. Pelayanan sosial yang diberikan pemerintah desa harusnya bersifat prima dan optimal. Harapannya adalah ketika masyarakat membutuhkan pelayanan tersebut akan merasakan kepuasan, sehingga

legitimasi masyarakat terhadap pemerintah desa menjadi meningkat dan membaik. disimpulkan bahwa dalam pelayanan administrasi, pemerintah desa caturtunggal telah menyelenggarakan beberapa pelayanan untuk menunjang segala kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraannya pula telah diberikan kemudahan dan kecepatan akses pelayanan sehingga masyarakat dapat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa Caturtunggal.

c. Transparansi oleh Pemerintah kepada Masyarakat

bahwa sistem transparansi oleh pemerintah desa Caturtunggal dilakukan melalui media cetak dengan memajang baliho di setiap padukuhan. Baliho tersebut menunjukkan anggaran yang disediakan oleh pemerintah desa dalam menunjang sistem pemerintah desa Caturtunggal. Sehingga

masyarakat mengetahui dan sebagai media kontrol terhadap pemerintah desa atas pelaksanaan pemerintahan baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan.

Beberapa penjelasan diatas tentang upaya transparansi yang dilakukan pemerinah desa Caturtunggal kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa aparatur desa Caturtunggal telah menerapkan sistem tranparansi dengan membentuk forum bersama warga sebagai wadah untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban. Terhadap upaya tersebut, masyarakat desa Caturtunggal juga memberikan respon yang baik dengan mampu memahami dan menghadiri forum dengan antusias.

d. Insidental

dalam penyediaan informasi dari pemerintah desa untuk masyarakatdesa

Caturtunggal telah baik dan maksimal namun tetap harus ditingkatkan dan dipertahankan. Masyarakat desa Caturtunggal telah menerima dengan baik upaya pemerintah dalam aspek transparansi informasi berbasis website. Hal tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi seputar keadaan dan kegiatan desa kapan saja dan di mana saja secara cepat dan mudah. penyediaan website yang dikelola oleh pemerintah desa Caturtunggal sebagai media transparansi atas beberapa program yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyampaian informasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan kemudian diberitakan di halaman website tersebut agar dapat dengan mudah dibaca dan diakses masyarakat. Akan tetapi pemerintah desa belum menyediakan halaman tersendiri untuk

masyarakat dapat mengakses program yang telah direncanakan dan yang akan dilakukan.

e. **Peranan Karang Taruna**

bahwa pelaksanaan kegiatan karang taruna di desa Caturtunggal telah disusun secara terorganisir perbulan kegiatannya. biaya pelaksanaan kegiatan karang taruna yang bersinergi dengan pemerintah dalam kepentingan masyarakat desa Caturtunggal. Dari berbagai kegiatan tersebutlah karang taruna melaksanakan peranannya yaitu bersinergi kepada masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka pembangunan masyarakat. Terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik seperti sarana prasarana maupun pembangunan

nonfisik seperti pemberian edukasi dan pelatihan.

f. Respon Positif

dalam pemberian respon positif oleh pemerintah kepada masyarakat selalu dilakukan dan diupayakan. Namun dalam urusan tindak lanjut perlu pertimbangan kembali atas hal-hal yang disampaikan dalam forum penyerapan keluhan dan aspirasi tersebut. Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah tidak bisa dilakukan secepat dan semudah yang terlihat. Perlu pertimbangan dan perangkingan untuk dilanjutkan menjadi RPJMDesa dan tentunya dengan beberapa kali musdes-musdes yang dilakukan

KESIMPULAN

1. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala Desa Caturtunggal yaitu komunikasi

dalam bentuk arahan kepada masyarakat. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa baik dalam pembangunan ataupun pelaksanaan program lainnya.

2. Dalam pemberian pelayanan telah sesuai konsep akuntabilitas pelayanan yaitu secara administratif, keuangan maupun kebijakan. Dalam penyediaan pelayanan, Pemerintah Desa Caturtunggal juga telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014.

3. Dalam pelayanan administrasi, pemerintah desa caturtunggal telah menyelenggarakan beberapa pelayanan untuk menunjang segala kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4. aparatur desa Caturtunggal telah menerapkan sistem tranparansi dengan membentuk forum bersama warga sebagai wadah untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban.
5. dalam penyediaan informasi dari pemerintah desa untuk masyarakat desa Caturtunggal telah baik dan maksimal namun tetap harus ditingkatkan dan dipertahankan.
6. manajemen keluhan telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa. Dengan menyelenggarakan pertemuan bersama warga dalam rangka menyerap keluhan dan aspirasi warga secara langsung, penyediaan kotak keluhan serta penyerapan keluhan berbasis media elektronik seperti email dan facebook.

DAFTAR PUSTAKA

Arja, s. (2000). akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintah. *jurnal akuntansi dan keuangan* , vol 2 no 2.

Dkk, c. w. (2015). akuntabilitas sosial pada pemerintahan lokal (studi terbentuknya akuntabilitas sosial masyarakat

kelurahan kalisoro). *IJPA-The Indonesian Journal of*.

Kurniawan, t. (2009). membangun mekanisme akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di indonesia . *mekanisme akuntabilitas publik* .

Mahmudi. (2009). akuntabilitas kinerja . 9.

Manopo, d. (2014). pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa (studi desa warisa kecamatan tawalan kabupaten minahasa utara). *E-Jurnal Unsrat*.

Mardiasmo. (2004). akuntansi sektor publik. Yogyakarta : Penerbit Andi .

Ratna. (2011). kearifan lokal sebagai semen pengikat kebudayaan. 94.

Sudana, a. (2015). akuntabilitas transparansi dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah kota Denpasar. *E-jurnal akuntansi Universitas Udayana* , vol 11 no 2 : 611-628.

Sugiyono. (2012). *metode penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Supriadi. (2015). pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa .

